

**IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT 3 PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA MINUMAN  
FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI TERKAIT  
PEREDARAN ARAK BALI TANPA LABEL DI KABUPATEN  
BULELENG**

**Oleh :**

**Gede Nova Wahyudi, NIM 1914101066**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait 1) implementasi Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali terkait Peredaran Arak Bali Tanpa Label di Kabupaten Buleleng serta 2) mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk kemasannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subyeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ketentuan Pasal 14 Ayat 3 Pergub Bali No 1 Tahun 2020 belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini tercermin dari masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan label sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku pada kemasan produknya. Ketidakefektifan aturan tersebut terletak pada kurang optimalnya peran pemerintah dalam hal sosialisasi ke masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait keberadaan Pergub Bali No 1 Tahun 2020. 2) Selanjutnya adapun akibat hukum terhadap pelanggaran pencantuman label pada kemasan produk dapat berupa sanksi administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan serta Pasal 62 dan Pasal 63 UUPK. Adapun sanksi administratif tersebut dapat berupa perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha.

**Kata Kunci :** Implementasi, Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020, Arak Bali, Label.

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 14 PARAGRAPH 3 OF BALI  
GOVERNOR'S REGULATION NUMBER 1 OF 2020 CONCERNING THE  
GOVERNANCE OF FERMENTED BEVERAGES AND/OR BALI  
SPECIAL DETAILS REGARDING THE CIRCULATION OF  
UNLABELED BALI ARAK IN BULELENG DISTRICT**

*By :*

**Gede Nova Wahyudi, NIM 1914101066**

*Law Department*

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out and analyze related to 1) the implementation of Article 14 Paragraph 3 of the Bali Governor's Regulation Number 1 of 2020 concerning the Management of Balinese Fermented and/or Distilled Drinks related to the Distribution of Balinese Arak Without Labels in Buleleng Regency and 2) find out what the consequences are. law against business actors who do not include labels on their product packaging. The type of research used is empirical legal research with descriptive research characteristics. The location of this research was carried out in Buleleng Regency. The data collection techniques used were document study, observation and interviews. The sampling technique used was the Non Probability Sampling technique and the subject determination used the Purposive Sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The research results show that 1) The provisions of Article 14 Paragraph 3 of Bali Gubernatorial Regulation No. 1 of 2020 have not been implemented properly. This is reflected in the fact that there are still business actors who do not include labels in accordance with the applicable provisions on their product packaging. The ineffectiveness of these regulations lies in the less than optimal role of the government in terms of outreach to the community and the lack of public legal awareness regarding the existence of Bali Gubernatorial Regulation No. 1 of 2020. 2) Furthermore, the legal consequences for violations of labeling on product packaging can be in the form of administrative sanctions as regulated in Article 61 Republic of Indonesia Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertisements as well as Article 62 and Article 63 of the UUPK. The administrative sanctions can take the form of confiscation of certain goods, announcement of a judge's decision, payment of compensation, order to stop certain activities that cause consumer losses, obligation to withdraw goods from circulation and revocation of business permits.*

**Keywords:** *Implementation, Bali Governor Regulation Number 1 of 2020, Bali Arak, Label*